

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
15-02-2021	19-02 s/d 19-04-2021	24-04-2021	28-04-2021	28-04-2021

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2 No.2, April 2021 (143-156)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Politik Lokal dan Patronase di Pilkada Serentak 2019 Desa Aremantai Semende Darat Muara Enim

Gentam Gemuruh

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: umarbinibnukasi@gmail.com

Kiki Mikail

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: kikimikail@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to see the true existence of local politics that forms patronage does not always hinder the progress of modern democracy. Then his research also refutes the allegations against the locality which is claimed to be a traditional authority that hinders the pace of modern democracy development. This research is a research with a descriptive case study approach. Researchers went directly to the field using observation and interview methods. Based on the results of the study, the researcher concludes that the existence of local wisdom is not only an activity to create human works, but also a social system that is solutive in holding a just democracy Pancasila. More than that, local wisdom is also interpreted as the fruit of consensus that constructs an order of value systems and gives potential political weight. These local wisdom values become an alternative to solve social problems that are normative in nature or even go beyond that (constitutional).

Keywords: *local election, patronage*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bahwa sejatinya eksistensi politik lokal yang membentuk patronase tidak selamanya menghambat laju perkembangan demokrasi modern. Kemudian penelitian ini juga membantah tuduhan terhadap lokalitas yang diklaim sebagai otoritas tradisional yang menghambat laju perkembangan demokrasi modern. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Peneliti langsung terjun ke lapangan dengan melakukan metode observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil kajian, peneliti menyimpulkan bahwa eksistensi kearifan

lokal tidak sekedar menjadi aktivitas cipta karya manusia saja, melainkan juga menjadi sistem sosial yang solutif dalam menggandeng demokrasi pancasila yang berkeadilan. Lebih dari itu, kearifan lokal juga dimaknai sebagai buah mufakat yang mengkonstruksi tatanan sistem nilai dan memberikan bobot politis yang potensial. Nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi alternatif untuk mengatasi problematika sosial yang bersifat normatif atau bahkan malampauai dari pada itu (konstitusional).

Keywords: *Pilkada, Patronase*

PENDAHULUAN

Dewasa ini budaya, agama dan politik selalu menjadi diskursus hangat dikalangan akademisi. Agama yang berelaborasi dengan budaya dan dibintangi oleh Kiai, tidak hanya berperan sebagai legitimasi teokulturalis dalam sketsa keberagaman dan kebermasyarakatan. Asimilasi agama dan budaya perlahan menjadi kearifan lokal yang kontributif terhadap negara dalam merealisasikan program kerja yang telah disusun oleh pemerintah secara sistematis. Secara historis, Kiai dengan kapasitasnya sebagai agamawan juga memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Lebih dari itu, Kiai juga berperan aktif dalam perumusan Idiologi dan bentuk Negara pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Karenanya, kontribusi ulama di negeri ini tidak boleh diabaikan sebelah mata. Tanpa perjuangan mereka mungkin kita masih disibukkan dengan perjuangan kemerdekaan dan diskursus kenegaraan yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Namun pada perkembangannya, peran Kiai hari ini mulai bergeser secara evolutif. Adaptifnya Islam dengan kondisi antropologi masyarakat pada setiap daerah, tentu bukan mustahil memberi peluang kepada Kiai untuk berperan ganda atau bahkan lebih. Jika umumnya Kiai hanya berkiprah pada ranah teososiologis, maka di beberapa tempat tertentu seperti di desa Aremantai kecamatan Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim. Selain berperan sebagai episentrum teososiologis, Kiai juga berperan sebagai ketua adat dan ahli keluarga (*Meraje*)

. Lebih dalam lagi berbicara tentang Semende dengan sistem ke-meraje dan adat Tunggu Tubangnya. Peneliti akan mencuplikan sekilas tentang Semende yang ditinjau dari aspek antropologi. Semende adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang menganut garis keturunan ibu (*matreliniar*). Artinya bahwa, Semende mendudukan perempuan (*Tunggu Tubang*) pada kondisi dan posisi terhormat terutama dalam hal kepemilikan waris dan kekerabatan kekeluarga. Kendati demikian, Tunggu Tubang tidak memiliki hak untuk melakukan pelepasan atau penjualan terhadap harta waris yang ia dapat secara turun-temurun. Sebab kuasa tertinggi dari harta pusaka adalah saudara laki-laki dari perempuan itu sendiri (*Muanai/Meraje*). Uniknyanya, Kiai yang ada di Semende juga berpotensi menjadi menjalankan tiga status (agamawan, ketua adat, meraje) dalam waktu bersamaan.

Dari sinilah kemudian Kiai memiliki peran secara kompleks. Baik peran sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, figur keluarga atau bahkan penarik massa saat perhelatan kontestasi berlangsung. Karenanya, peneliti akan mengurai dan menjelaskan bagaimana siasat politisi dan Kiai yang sekaligus juga menjadi budayawan serta Meraje dalam adat Tunggu Tubang. Tiga entitas yang termanunggalkan di atas, menjadi mitra politisi dan dipanggil dengan sebutan Tuan Guru Kiai (Selanjutnya ditulis: TGK). Kemudian peneliti juga akan melihat bagaimana TGK dapat bersinergi dengan politisi dan memanfaatkan status sosial mereka. Sehingga, proses sosialisasi, persuasi, dan penetrasi yang mereka kemas dengan nilai-nilai agama dan budaya dapat berimplikasi pada progresivitas partisipasi politik secara masip. Oleh sebab itu, tidaklah menjadi suatu hal yang berlebihan ketika isu agama dan primordialisme dihembuskan saat pemilu berlangsung.

Sebab, kedua entitas ini memiliki bobot politis yang sama kuat dan perlu untuk diperhitungkan.

Sebagai wujud dari *Warosatul Ambiya'*, maka dewasa ini ulama (TGK) menjadi konsultan umat ketika umat mengalami kebingungan dalam menyelesaikan persoalan. Terkhusus problematika yang bersifat teologis. Karenanya, labelitas TGK pada seseorang bukanlah hal main-main. Seorang TGK tidak hanya dilihat dari segi faktivitas dan karakteristik pribadinya saja, namun yang terpenting adalah sejauh mana masyarakat memberikan pengakuan dan kepercayaan kepadanya sebagai teladan serta publik figur bagi orang banyak.

Perlu diketahui bahwa, saat ini peran TGK di Semende tidak melulu sebatas tokoh agama saja. Melainkan juga berperan sebagai ketua adat dan Meraje di dalam sistem adat Tunggu Tubang. Secara leksikal, Meraje diterjemahkan sebagai raje atau raja. Sedang secara terminologi, Meraje adalah status yang di terima oleh setiap anak laki-laki (Muanai) dan berperan sebagai ahli keluarga serta pengawas langsung atau pengawas pelaksana pada tingkat pertama. Selain itu Meraje juga berperan sebagai pemimpin musyawarah, menjadi juru bicara atau besuare, membimbing, mengayomi, dan mengawasi para Anak Belai, mengawasi harta pusaka, memberi hukuman atau sanksi, dan melestarikan adat Tunggu Tubang. Konstruktivitas inilah yang kemudian membuat Semende dengan semua kekayaannya menjadi objek kajian menarik bagi para sosiolog dan antropolog serta para politisi untuk mengeksploitasi potensialitas suara melalui kampanye yang aspiratif, religius, kulturatif, dan akomodatif.

Sinergisitas politisi dan TGK menjadi aktor utama dalam perubahan pola pemilih di desa Aremantai kecamatan Semede Darat kabupaten Muara Enim. Struktur budaya yang mengikat tentu menjadi magnet untuk membendung suara menjadi homogen dalam jumlah yang besar. Namun di lain sisi, aktivitas seperti ini juga turut serta membuka oportunitas bagi oknum untuk memperkaya diri sendiri. Kondisi ekonomi yang kurang bersahabat tentu menjadi alasan kuat kenapa sifat oportunistik ini tidak dapat di iklaskan begitu saja. Marx dalam bukunya *Hadegger* yang berjudul "Hantu-hantu Marx" mengatakan bahwa lemahnya ekonomi menjadi sebuah akar persoalan serius dalam menjaga kestabilan hidup. Marx menegaskan, bahwa urgensi ekonomi menjadi titik vital dan penentu dalam menjawab semua sektor permasalahan masyarakat. Sebab pada keberlanjutannya, ketidak maksimalan mengatasi permasalahan sistem ekonomi ini akan berdampak pada ketidak teraturan sosial. Alhasil praktik nakal seperti kriminal, kekerasan, dan intervensi atas hak orang lain, menjadi suatu hal yang lumrah sebagai determinan dari kemiskinan itu sendiri. Bahkan parahnya lagi, agama juga menjadi bahan komoditas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan status sosial di dalam masyarakat. Agama yang seharusnya dibunyikan sebagai daya demokratisasi untuk menjaga equality, egality, dan HAM agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bernegara. Malah menjadi alat untuk mengeksploitasi peluang demi memenuhi kebutuhan secara praktis dan personal.

TINJAUAN LITERATUR

Sejatinya riset yang terkait dengan relasi agama, budaya, dan politik seperti peneliti jelaskan pada lembar sebelumnya ini telah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya. Hanya saja terdapat distingsi tempat dan waktu serta formasi kajian penelitian di antara

peneliti. Dalam buku Politik Kewarganegaraan di Indonesia, Muhammad Arif telah menuangkan secara komprehensif di dalam skripsinya yang berjudul “Identitas Sosial Tokoh Adat Islam ‘Wetu Telu’ di Bayan, Lombok Utara”. Ia menjelaskan bahwa di ruang sosial dan politik, kabupaten Lombok Utara diwarnai oleh pertemuan dua arus besar. Yakni kebangkitan adat dan demokrasi elektoral. Interaksi antara keduanya masih belum menemukan bentuk yang ideal. Benar bahwa demokrasi termasuk desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kesempatan luas bagi kebangkitan adat. Namun, bukan hanya adat yang memperoleh kesempatan itu. Demokrasi juga memberikan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk mengikuti kontestasi politik yang terbuka. Kejadian di Lombok Utara membuktikan betul bahwa politik tidak terhegemoni oleh religiusitas dan budaya setempat yang ada. Metode persuasif dengan cara blusukan agar masyarakat terpikat akhirnya membuahkan hasil yang maksimal dan tentu opportunity dari sistem adat dan agama menjadi tidak potensial untuk digunakan Sebagai bentuk penegasan dari penelitian diatas, riset senada juga pernah dikemukakan oleh Imrotul Hasanah yang sama-sama berorientasi untuk melihat bahwa meskipun masyarakat masih membutuhkan figure dari seorang petua adat atau agamawan dalam meyakinkan suara yang mereka pilih adalah pilihan yang tepat. Akan tetapi meningkatnya demokratisasi dan modernisasi tentu berimbas juga pada sikap masyarakat itu sendiri. Karena dewasa ini masyarakat sudah mulai cerdas dan sudah bisa menilai tokoh mana yang bisa dijadikan panutan yang benar. Masyarakat sudah lebih mandiri dalam menentukan pilihannya. Jadi bisa di katakan pengaruh Kiai bagi masyarakat perkotaan sangat rendah di dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Namun meskipun demikian, masih terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari hasil perolehan suara antara calon pejabat yang berasal dari kalangan agamawan dan calon yang bukan dari kalangan agamawan. Ini dibuktikan oleh Imrotul Hasanah dalam risetnya pada tahun 2013 di Kabupaten Pamekasan.

H. Sadi memaparkan bagaimana sikap politik kiai dan juga menjawab motif apa yang melatarbelakangi kiai sehingga terlibat pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kecamatan Glenmore Banyuwangi. Sebetulnya, keterlibatan kiai dalam politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah politik Indonesia. Modal dasar sebagai legitimator teologis, tentu mengangkat marwah mereka sebagai sosok pewaris para nabi (Al-Ulama’ Warasatul An Biya’). Karenanya tidak heran kemudian posisi yang sangat strategis ini menjadi basis peneguhan legitimasi di tengah-tengah masyarakat. Ikhtilafiyah mengenai perlu tidaknya kiai berpolitik nyatanya selalu hadir dalam setiap denyut perubahan zaman dan permasalahan masyarakat. Sadi menambahkan bahwa, akan menjadi sangat kontradiktif ketika kiai yang seharusnya menjadi teladan profesional malah memanfaatkan status sosialnya yang didasari atas motif ekonomi, pragmatis, dan kemudian berdalih dengan pendekatan sosiologis-teologis.

Masykuri Abdullah dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi” juga ikut menjelaskan bagaimana dialek antara agama dan politik dalam konteks kekinian. Ia menyimpulkan bahwa modernisasi politik merupakan suatu keniscayaan sebagai upaya untuk mewujudkan negara modern yang menerapkan sistem demokrasi yang lebih substantif. Namun dalam konteks Indonesia yang berideologi Pancasila, modernisasi politik itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler, walaupun negara ini dalam hal dan tingkat tertentu telah melakukan sekularisasi politik. Hubungan antara agama dan negara tetap merupakan hubungan yang bersifat intersectional, yang berarti hubungan persinggungan antara agama dan negara, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Bahkan legitimasi agama tetap diperlukan dalam aspek kehidupan berbangsa dan negara.

Dalam suatu negara, seyogyanya agamawan dapat memberikan kontribusi yang positif dengan memberikan input bagi perumusan dan sosialisasinya serta menjadikan agama sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusifisme dalam masyarakat. Sehingga apa yang kita harapkan menjadi masyarakat madani dapat terealisasi dengan maksimal.

Demokrasi adalah sebuah proses rasionalisasi logis dalam menciptakan pemilih yang berkualitas. Demokrasi membunuh panatisme berlebihan seperti etnosentrisme, primordialisme, atau bahkan seorang publik figur (Premanisme) yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas. Sejatinya, demokrasi memberikan penuh kebebasan bagi para penganutnya untuk melakukan kreasi dan inovasi semaksimal mungkin selagi itu tidak mengintervensi hak orang lain dan tidak bertentangan dengan aturan Negara. Namun pada keberlanjutannya, demokrasi juga membuka keran politik non-etis di kalangan Elite maupun di kalangan bawah. Demokrasi yang harusnya mendewasakan agama budaya, etnografi primordialisme, dan lain-lain sebagainya. Malah menjadi dalih yang digunakan oleh oknum untuk melakukan sebuah tindakan yang mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri. Pada perkembangannya, demokrasi memberikan peluang kepada siapa saja untuk berekspresi dengan leluasa. Demokrasi memfasilitasi setiap entitas yang ingin berinovasi membangun negeri baik secara materil maupun moril. Karenanya tidak jarang para agamawan ikut serta memberikan kontribusi mereka supaya negeri ini memiliki imun yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman yang sudah mulai cendrung sekular. Jika penelitian terdahulu hanya berbicara tentang relasi kiai dan politik dalam konteks kekinian. Maka penelitian yang dikaji kali ini adalah tentang TGK yang melampawi otoritas keagamaan. Penelitian ini kemudian melihat bagaimana politisi dan TGK dengan semua kapasitasnya yang dimilikinya mampu memaksimalkan status sosial mereka dalam membangun dukungan sehingga grafik partisipasi politik dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana yang dikutip oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena sosial dan partisipan atau orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data untuk penelitian. Dengan demikian, data akan terkumpul apabila dilakukan pengumpulan data dengan sebaik mungkin.

1. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan teknik pendekatan eksploratif. Yaitu teknik yang bersifat eksplorasi, maka peneliti akan mentadabburi tempat penelitian dengan melakukan penjelajahan lapangan agar memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber data yang terdapat di tempat itu; penjajakan. Peneliti mengidentifikasi orang-orang potensial dan urgen untuk diwawancarai sehingga data yang peneliti butuhkan dapat diterima secara optimal. Dari kategori-kategori itu peneliti mengeksplorasi data seekploratif mungkin sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Sehingga peneliti bisa memerikan

hasil kajian anyar yang jelas perhal relasi patron (politik) dan klon (budaya) di desa Aremantai kecamatan Semende Darat Ulu ketika perhelatan pemilihan umum serentak tahun 2019.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Aremantai Jl. KH. Abdul Jabbar desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Adapun sebab peneliti mengambil tempat ini karena: Pertama, Desa ini adalah Desa kelahiran peneliti dan secara otomatis peneliti akan ikut terlibat dalam setiap agenda aktivitas politik merkipun hanya secara formal. Kedua, Desa ini merupakan salah satu Desa yang mengelat pemiliha umum serentak pada tahun 2019. Tercatat pemilu serentak tahun 2019 diikuti oleh anggota legeslatif dan Anggota eksekutif. Kemudian yang ketiga peneliti memilih lokasi penelitian di Desa ini karena belum adanya penelitian yang sama oleh peneliti lain tentang topik yang dibahas oleh peneliti di desa Aremantai yaitu Politik Lokal dan Patronase. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti juga merupakan salah satu alasan peneliti memilih melakukan penelitian di desa Aremantai kecamatan Semende Darat Ulu.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data inti yang menjadi penguat bagi peneliti untuk menunjukkan dan mempertegas hasil penelitian. Data ini umumnya berbentuk verbal bagi para peneliti yang menggunakan metode pendekatan studi kasus. Selain itu data primer juga bisa berbentuk lakan informatif yang dilakukan oleh objek terpercaya (informan) dan berkenaan dengan variabel yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data data pelengkap yang digunakan sebagai analisis dan bersifat sebagai data pendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, sebab nstrument dalam membangun pembahasan yang argumentative adalah data yang kridibel. Karenanya mengetahui teknik pengumpulan data merupakan suatau hal yang sangat urgen oleh seorang peneliti dalam mendapatkan data yang maksimal dan memenuhi standar data yang ditetapkan. Berikut metode yang di gunakan untuk memperoleh data dalam penulisan Skripsi ini adalah:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan langsung yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya

peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki. Karenanya teknik ini sangat mengedepankan dua indra yang sangat vital yakni mata dan telinga. Dalam melakukan pengamatan, mata lebih dominan dibandingkan dengan telinga, sebab mata tergolong indra yang cepat letih.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan digali dari sumber data secara langsung melalui dialog atau tanya jawab. Berlangsungnya wawancara ini berarti terjadinya proses interaksi antara pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Baik dokumen yang telah tersedia di lapangan maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa gambar, salinan berkas, rekaman gambar bergerak dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan sebelum, sedang dan setelah kontestasi pemilihan umum berlangsung.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan mensistematisasikan data dengan baik dalam bentuk yang jelas untuk mengungkap bagaimana siasat politisi dan TGK dalam memanfaatkan status sosial mereka ketika kontestasi politik berlangsung.

c. Verifikasi Data dan Penegasan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan mengeksplorasi pembahasan melalui pemanfaatan hasil observasi, wawancara, analisa dokumen secara kritis dan komperhensif. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian agar mendapatkan data yang valid. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara semistruktur. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan ditanya secara lepas sehingga ada perluasan topik dan penyempitan pertanyaan kepada informan. Kemudian yang terakhir, peneliti melakukan kajian pustaka melalui analisa dokumen-dokumen terkait dengan kajian penelitian. Analisa eksploratif pada penelitian ini sengaja disajikan sebagai bentuk argumentasi peneliti dalam menjawab semua pertanyaan yang termaktub di dalam rumusan masalah pada bab pertama sebelumnya. Dewasa ini banyak orang menganggap bahwa sistem demokrasi adalah usaha negara untuk menghormati hak-hak individu setiap warganya. Selain itu demokrasi juga ditafsirkan sebagai formasi negara yang berusaha menjembatani kemajemukan ke dalam satu kesepakatan bersama seperti Pancasila.

Namun meskipun demokrasi memberi ruang kepada entitas lain, bukan berarti demokrasi mengesampingkan proses filtrasi yang disiplin ketika mempersilahkan kearifan lokal eksis bebas di dalamnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan komunikasi yang interaktif agar keduanya saling memberi profit atau paling tidak terhindarkan dari gesekan yang dapat memecah belah satu sama lain. (Poloma, 2015)

Sejatinya eksistensi kearifan lokal tidak selamanya menghambat laju perkembangan demokrasi modern. Politik lokal tidak bisa dinilai secara tendensius, seolah menjadi trigger kemajuan zaman dan laju nilai-nilai demokrasi yang logis dan rasional. Pada kajian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana politik lokal dan patronase dapat menjadi alternatif demokrasi modern dalam memproduksi operator negara yang relegius, akomodatif, dan proporsional. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu, peneliti juga akan memaparkan bagaimana relasi antara patron dan klien dalam membangun kerjasama politis ketika pemilihan umum serentak tahun 2019. Dari sini juga secara bertahap kita dapat melihat masyarakat Desa Aremantai mulai termodernkan dari tradisional menjadi masyarakat madani yang rasional.

1. Politik Lokal

Jika kita tarik ulur ke belakang, peristiwa reformasi tahun 1998 jelas memberi angin segar bagi kearifan lokal untuk bergerak bebas pasca runtuhnya rezim orde baru. Saat ini eksistensi lokalitas tidak sekedar menjadi aktivitas cipta karya manusia saja, melainkan juga menjadi sistem sosial yang solutif dalam menggandeng demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Lebih dari itu, kearifan lokal juga dimaknai sebagai buah mufakat dari masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial. Namun yang perlu diperhatikan bahwa, kearifan lokal juga wajib menjadi adaptif terhadap kondisi modernitas dewasa ini. Sebab agresivitas arus globalisasi dan modernisasi bukan tidak mungkin dapat mendisrtorsi nilai-nilai kebjajikan lokal yang sudah tertanam kuat dan masip sejak lama.

Frans Budi Hardiman dalam bukunya *Demokrasi dan Sentimentalitas* mencuplikkan bahwa, kearifan lokal merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang memiliki varian budaya yang heterogen. Konsep kemajemukan ini muncul dalam konteks masyarakat kultural yang menuntut pengakuan akan eksistensi mereka, misalnya dalam menjalankan norma-norma yang mereka percayai. Satu sisi kita memahami jika kemajemukan meminta hak-hak kolektif yang sama kepada semua kelompok kultural untuk memelihara dan mengungkapkan tradisi serta identitas kolektif mereka. Dalam perjalannya, perlahan kearifan lokal dapat bertransformasi menjadi suatu pentolan politik yang kuat. *Political power* ini beranjak dari sistem nilai yang diimplementasikan oleh masyarakat dan membentuk kesepakatan masip secara tegas. Dari sinilah kemudian nilai-nilai kearifan lokal menjadi alternatif untuk mengatasi problematika sosial yang bersifat normatif atau bahkan malampauai dari pada itu (konstitusional).

Sejatinya eksistensi kearifan lokal tidak selamanya menghambat laju perkembangan demokrasi modern. Politik lokal tidak bisa dinilai secara tendensius, seolah menjadi trigger kemajuan zaman dan laju nilai-nilai demokrasi yang logis dan rasional. Pada kajian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana politik lokal dan patronase dapat menjadi alternatif demokrasi modern dalam memproduksi operator negara yang relegius, akomodatif, dan proporsional. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu, peneliti juga akan memaparkan bagaimana relasi antara patron dan klien dalam membangun kerjasama politik ketika pemilihan umum serentak tahun 2019. Dari sini juga secara bertahap kita dapat melihat masyarakat Desa Aremantai mulai termodernkan dari tradisional menjadi masyarakat madani yang rasional.

2. Politik Lokal

Jika kita tarik ulur ke belakang, peristiwa reformasi tahun 1998 jelas memberi angin segar bagi kearifan lokal untuk bergerak bebas pasca runtuhnya rezim orde baru. Saat ini eksistensi lokalitas tidak sekedar menjadi aktivitas cipta karya manusia saja, melainkan juga menjadi sistem sosial yang solutif dalam menggandeng demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Lebih dari itu, kearifan lokal juga dimaknai sebagai buah mufakat dari masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial. Namun yang perlu diperhatikan bahwa, kearifan lokal juga wajib menjadi adaptif terhadap kondisi modernitas dewasa ini. Sebab agresivitas arus globalisasi dan modernisasi bukan tidak mungkin dapat mendisrtorsi nilai-nilai kebijakan lokal yang sudah tertanam kuat dan masip sejak lama.

Frans Budi Hardiman dalam bukunya *Demokrasi dan Sentimentalitas* mencuplikkan bahwa, kearifan lokal merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang memiliki varian budaya yang heterogen. Konsep kemajemukan ini muncul dalam konteks masyarakat kultural yang menuntut pengakuan akan eksistensi mereka, misalnya dalam menjalankan norma-norma yang mereka percayai. Satu sisi kita memahami jika kemajemukan meminta hak-hak kolektif yang sama kepada semua kelompok kultural untuk memelihara dan mengungkapkan tradisi serta identitas kolektif mereka. Dalam perjalannya, perlahan kearifan lokal dapat bertransformasi menjadi suatu pentolan politik yang kuat. *Political power* ini beranjak dari sistem nilai yang diimplementasikan oleh masyarakat dan membentuk kesepakatan masip secara tegas. Dari sinilah kemudian nilai-nilai kearifan lokal menjadi alternatif untuk mengatasi problematika sosial yang bersifat normatif atau bahkan malampauai dari pada itu (konstitusional).

Seperti yang peneliti jelaskan dimuka, eksistensi politik lokal di Desa Aremantai sudah terefleksi oleh faktivitas peran yang dimiliki TGK. Peran ini tidak hanya menjadi tugas

pokok dan fungsi TGK secara personal, namun peran ini juga menjadi simbol dan di dalamnya terdapat konstruk sosial yang diproduksi secara mufakat oleh masyarakat. Untuk itu, agar kita tergambar jelas bagaimana metapor terkait kajian di atas, maka peneliti telah mengkodifikasikannya ke dalam dua sub-pembahasan. Pengkodifikasian ini dibuat secara detil supaya pembaca mendapatkan informasi yang komperhensif sehingga tumbuh rasa ketertarikan untuk melakukan kajian lebih dalam lagi. (Ritzer, 2011)

Seperti penelitian pada umumnya, Kiai dalam hal ini TGK dipandang sebagai agen perubahan sosial yang dominan bermain pada tatanan religi dan kultural. Hiroko Horikosi memandang bahwa Kiai menjadi tolak ukur dalam menunjukkan kewaspadaan terhadap prinsip otoritas, terlebih jika kemudian terjadi kemerosotan moral atau tersandung suatu perkara tertentu. Maka Kiailah yang menjadi figur penetralisir konflik hingga kondisi menjadi tentram. Sama halnya dengan penelitian Hiroko Horikosi. Kajian yang peneliti eksplor juga mendudukan Kiai sebagai agen dalam mentransformasikan nilai-nilai kultural ke dalam sistem demokrasi modern. Hanya saja atribusi yang digunakan oleh TGK tidak melulu terkait aspek budaya dan agama, namun juga menyentuh aspek kekeluargaan secara mendalam (*Seghumah Ghaye*).

Selaras dengan sebutan nama belakangnya (Kiai), sekilas sudah sangat tergambar betul bahwa TGK tentunya memiliki ilmu agama yang mumpuni, tidak hanya itu, mereka juga menguasai beberapa cabang ilmu tradisional lainnya. Baik itu yang bersifat kultural maupun berbentuk keterampilan. Terbukti dengan kemampuan spiritualnya yang adaptif, TGK dapat memadukan antara sistem nilai kearifan lokal Desa Aremantai tanpa harus terjadi pertentangan yang kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, TGK juga menjadi mentor dalam pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Mulai dari kajian aqidah, syariat, akhlak, ataupun wirid yang lazim digunakan dalam beribadah sehari-hari. Artinya bahwa, TGK telah menjadi edukator yang baik bagi masyarakat Desa Aremantai. Kehadirannya menjadi sangat fundamental dalam menstimulus nilai-nilai kebajikan sehingga potensi keamanan, kenyamanan, dan kemaslahatan bersama dapat dirasakan dengan hikmat. Lebih dari itu TGK juga berperan penting dalam mengkaderisasi para muridnya. Bukan hanya kawula tua, TGK juga meng-cover kaum milenial untuk turut serta secara aktif dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan.

a. TGK Sebagai Meraje

Secara leksikal Meraje diterjemahkan sebagai raje atau raja. Sedang secara terminologi, Meraje adalah status yang diterima oleh setiap anak laki-laki (Muanai) dan berperan sebagai ahli keluarga serta pengawas langsung atau pengawas pelaksana pada tingkat pertama. Selain itu Meraje juga berperan sebagai pemimpin musyawarah, menjadi juru bicara atau besuare, membimbing, mengayomi, mengawasi para Anak Belai, mengawasi harta pusaka, memberi hukuman atau sanksi, dan yang pastinya melestarikan adat Tunggu Tubang. Namun yang perlu diketahui juga bahwa, tugas-tugas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban selaku Meraje, biasanya Muanai tertua yang lebih di dahulukan, baru kemudian yang lebih muda dan sampai kepada yang termuda. Kecuali apabila yang tertua telah menyerahkan hal itu kepada yang lebih muda untuk mengambil kebijaksanaan dan melaksanakannya.

Adat Tunggu Tubang memiliki klasifikasi kepemimpinan dan pengawasan yang terstruktur secara sistemais. Yakni; Payung Meraje, Jenang Meraje, dan Meraje. Payung Meraje berfungsi sebagai pengawas tertinggi terhadap Tunggu Tubang dan semua anggota Jurai atau keluarga besar. Kemudian Jenang Meraje berperan sebagai pengawas tingkat kedua, lalu Meraje berfungsi sebagai pengawas langsung atau pengawas

pelaksana pada tingkat pertama. Sebagaimana formasi kedudukan pada umumnya, di dalam adat Tunggu Tubang Meraje juga memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan kerukunan dan menjaga nama baik keluarga.

b. TGK sebagai Ketua Adat

Sebelum tahun 2013, sistem kebudayaan di Desa Aremantai masih memiliki pola klasik dengan tidak mengedepankan mekanisme formal yang administratif. Namun meskipun tidak memiliki struktur kepengurusan yang baku, mekanisme kepengurusan adat tetap berjalan dengan tertib dan kondusif. Peneliti melihat ada dua faktor yang membuat eksistensi budaya Desa Aremantai berjalan dengan hikmat. Pertama; Kepengurusan adat dipimpin oleh orang-orang yang agamis, kharismatik, dan kompeten pada bidangnya. Dan kedua konstruk lokalitas yang eksis mensupport TGK dalam mengembangkan potensi mereka sebagai aparat kearifan lokal di Desa Aremantai.

Adalah menjadi sangat etis dan rasional jika masyarakat senantiasa mengedepankan dan menunjuk TGK dalam mendudukan perkara-perkara penting yang menyangkut kemaslahatan bersama. Argumen ini peneliti ambil dari hasil wawancara dengan seorang pakar sejarah Desa Aremantai yang bernama bapak Mukrim. Bapak Mukrim merupakan seorang Tunggu Tubang yang sangat aktif dalam mengikuti kegiatan adat (Aguan Besar). Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertukar pikir dengan para sepuh dan para pelajar yang merantau di wilayah perkotaan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Mukrim yang peneliti peroleh.

Formalisasi adat di sini sebagai bentuk penguatan adat dengan rakitan sistem yang sistematis (Struktur) dan nantinya membuat adat akan lebih terpoteksi. Niklas Luhmann mengatakan bahwa, sejatinya suatu sistem tidak pernah sekompleks lingkungannya, sistem mengembangkan subsistem-subsistem baru dan membangun berbagai hubungan antara subsistem untuk menangani lingkungan secara efektif. Jika tidak, sistem akan dikuasai oleh kompleksitas lingkungan. Senada dengan Luhmann, kearifan lokal juga akan ikut terdistorsi oleh masipnya modernitas hari ini, oleh sebab itu eksistensi kearifn lokal harus tersistemasi dengan baku dan legal agar terproteksi secara menyeluruh Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, salah satu cara untuk membentenginya yakni dengan memperkuat struktur.

3. Patronase

Sejatinya kearifan lokal pada kajian ini dimaknai sebagai simbol integrasi dan bertujuan mengikat masyarakat melalui mitos bersama yang berupa sistem nilai dan norma. Kearifan lokal juga dijadikan kendaraan bagi para TGK berjuang dalam menjaga dan melestarikan budaya. Selain itu, kerifan lokal Tunggu Tubang turut memberi ruang kepada para TGK agar dapat bergerak bebas mempersuasi masyarakat dan berujung pada keberhasilan penggulungan suara satu arah secara besar-besaran. Dilihat dari sudut pandang patronase, meskipun dalam konteks ini masyarakat berposisi sebagai kline. Namun bukan berarti masyarakat Desa Aremantai memiliki distingsi yang begitu tajam dengan para TGK. Perlu diketahui juga bahwa kontribusi mereka dalam pemilihan umum sangat menjadi perhatian khusus. Sebab berhasil atau tidaknya kearifan lokal berkontstasi dengan demokrasi modern, yakni ditentukan oleh perolehan suara ketika pemilihan umum. Karenanya peran TGK menjadi sangat diuji untuk meyakinkan para pemilih bahwa rekomendasi mereka adalah usaha yang tepat dalam menjaga dan melestarikan budaya. Selain itu, TGK juga telah melakukan transformisasi nilai-nilai kebajikan lokal secara substantif ke dalam nilai-nilai demokrasi modern.

Senada dengan itu, fenomena politik lokal dan patronase yang ada di Desa Aremantai hari ini menjadi bukti konkrit dari penjelasan Bourdieu dalam mentafsirkan teori kekuasaan Weber. Hal ini terlihat ketika kecakapan TGK yang dibekali ilmu agama dan budaya, menjadi modal besar dalam menghegemoni masyarakat banyak. Kedua modal itu juga menjadi pertimbangan serius bagi masyarakat, sebab hanya orang yang konsekuen terhadap nilai-nilai agama dan yang dapat diterima layak tidak rekomendasinya diikuti. Lebih-lebih lagi ini persoalan memilih pemimpin. Bagi masyarakat Desa Aremantai, pemimpin tidak hanya berorientasi pada kecakapan ilmu pemerintahan dan birokrasi saja, melainkan juga kompeten dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat baik itu secara sosial dan kultural.

Kemudian yang kedua, kita juga memahami bahwa keberpihakan masyarakat kepada putra daerah bukanlah suatu hal yang tabu. Layaknya penduduk pada umumnya, putra daerah memiliki keterikatan emosional yang begitu erat dengan tanah kelahirannya. Contoh sederhana adalah terbentuknya paguyuban dan ikatan pelajar daerah di tengah-tengah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ini semua tergerak karena ada ikatan emosional terhadap tanah kelahiran sehingga menciptakan rasa sukacita dan kekeluargaan antar sesama. Artinya bahwa, jika kaum muda memiliki sense of belonging yang tinggi, maka sama halnya dengan masyarakat pedesaan, mereka juga memiliki ikatan emosional yang jauh lebih tinggi ketimbang kaum pelajar (Paguyuban). Sebab mereka tidak hanya menjaga dan melestarikan adat di dalamnya, tetapi juga berkewajiban membendung dampak negatif modernisasi karena secara perlahan telah mendistorsi kearifan lokal mereka yang sudah eksis sejak lama.

Pungkasnya relasi patron dan klien tidak selalu disebabkan oleh motif ekonomi, ketergantungan, atau lain sebagainya. Lebih dari itu relasi patron klien juga berdiri sebagai dua entitas yang dapat membentuk mitra yang kontributif dan solutif dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Khususnya pengemplementasian sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, menjadi tidak lebih bijak jika patron klien hanya dilihat secara tendensius dan mengcualikan potensialitasnya yang dapat memberi perubahan secara signifikan bagi kemaslahatan orang banyak.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas, peneliti menarik benang merah bahwa, sejatinya eksistensi politik lokal tidak selamanya menghambat laju perkembangan demokrasi modern. Politik lokal tidak bisa dinilai secara tendensius, seolah menjadi trigger kemajuan zaman saat ini. Saat ini eksistensi kearifan lokal tidak sekedar menjadi aktivitas cipta karya manusia saja, melainkan juga menjadi sistem sosial yang solutif dalam menggandeng demokrasi pancasila menjadi demokrasi yang berkeadilan. Lebih dari itu, kearifan lokal juga dimaknai sebagai buah mufakat yang mengkonstruksi tatanan sistem nilai dan memberikan bobot politis yang potensial. Adapun yang menjadi konsen penelitian ini adalah hubungan patronase antara Dari sinilah kemudian nilai-nilai kearifan lokal menjadi alternatif untuk mengatasi problematika sosial yang bersifat normatif atau bahkan malampau dari pada itu (konstitusional). Fenomena ini juga kemudian memberi ruang kepada para TGK untuk lebih mudah memprovokasi masyarakat dan nantinya berimplikasi pada keberhasilan penggulungan suara satu arah secara besar-besaran.

Terakhir, resultan dari penelitian ini menyatakan bahwa politik lokal dan patronase tidak selalu harus dimaknai secara tendensius. Lokalitas yang ada dapat diintegrasikan dan dikomunikasikan secara interaktif sehingga menjadi solusi dari suatu kecemasan demokrasi. Politik lokal dan Patronase menjawab bahwa kearifan lokal dapat

menjadi alternatif ketika demokrasi modern tidak bisa memberikan produk yang solutif atas kegelisahan pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- George Ritzer, 2012, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Loginna Novadona Bayo dkk, 2016, *Rezim Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Margaret M. Poloma, 2015, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.